

Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Aceh Tenggara: Tantangan dan Strategi Pembinaan

The Dynamics of Harmony Among Religious Communities in Southeast Aceh Regency: Challenges and Development Strategies

Faizal Lukman^{1*}, M. Aditya Prayoga², M. Syukri Riski Hamdalah²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

² Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

ARTICLE HISTORY

Received: 08-8-2025

Accepted: 03-12-2025

Publishe: 31-12-2025

Keywords:

Ethnic and Religious Diversity; Interfaith Dialogue; Interfaith Harmony; Multicultural Education; Socio-Economic Conflict; Participatory Approach.

Abstract: This study discusses the dynamics of interfaith harmony in Aceh Tenggara Regency, which has diverse ethnic and religious backgrounds. As a region characterized by cultural and religious pluralism, Aceh Tenggara faces challenges in maintaining harmony among adherents of different faiths. The aim of this research is to identify the challenges faced, as well as the fostering strategies implemented by the government and the community to enhance interfaith harmony. The methodology employed in this study is qualitative-descriptive with a field study approach. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews. The findings indicate that interfaith harmony in Aceh Tenggara encounters several challenges, including differing religious interpretations, social-economic conflicts of interest, and a lack of cross-cultural understanding. To address these challenges, the government and religious leaders have implemented various fostering strategies such as interfaith dialogue forums, joint social activities, and multicultural education in schools. These findings provide insights into the importance of participatory approaches in fostering harmony, as well as the necessity for support from all elements of society to create a harmonious social climate in Aceh Tenggara.

Keywords:

Dialog Antaragama; Harmoni Antaragama; Keberagaman Etnis dan Agama; Konflik Sosial-Ekonomi; Pendidikan Multikultural; Pendekatan Partisipatif.

Abstrak: Penelitian ini membahas dinamika kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki keragaman etnis dan agama. Sebagai wilayah dengan pluralitas budaya dan agama, Aceh Tenggara menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan antar pemeluk agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi serta strategi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Aceh Tenggara menghadapi beberapa tantangan, antara lain perbedaan interpretasi agama, konflik kepentingan sosial-ekonomi, serta kurangnya pemahaman lintas budaya. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah dan tokoh agama melakukan berbagai strategi pembinaan seperti forum dialog lintas agama, kegiatan sosial bersama, dan pendidikan multikultural di sekolah. Temuan ini memberikan wawasan mengenai pentingnya pendekatan partisipatif dalam membina kerukunan serta perlunya dukungan dari semua elemen masyarakat untuk menciptakan iklim sosial yang harmonis di Aceh Tenggara.



© 2025 Authors

Under The License [CC-BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Corresponding Author: Faizal ✉ faizallukman@uinsu.ac.id
<https://doi.org/10.47766/almabhats.v10i2.4846>

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Tenggara terletak di Provinsi Aceh, wilayah yang secara historis dikenal dengan populasi mayoritas Muslim yang sangat kuat (Hanafiah, 2018). Namun, berbeda dengan wilayah Aceh lainnya, Aceh Tenggara memiliki tingkat keberagaman agama yang relatif tinggi (Misran, 2020; Sekedang et al., 2022). Selain Islam, agama Kristen juga dianut oleh sebagian penduduk, yang tersebar di berbagai desa dan kecamatan (Siregar & Utomo, 2023).

Keberagaman ini merupakan cerminan dari keragaman etnis yang ada di kabupaten ini, termasuk suku Alas, Batak, Gayo, Karo, dan suku-suku lainnya yang datang dari berbagai daerah. Keberadaan komunitas-komunitas etnis dan agama yang berbeda ini menjadikan Aceh Tenggara sebagai salah satu wilayah yang multikultural di Aceh (Fikri, 2015; Ismail, 2020).

Selain itu, beberapa penelitian relevan menunjukkan perkembangan masyarakat Aceh Tenggara di berbagai sector, seperti pengembangan ekonomi dan UMKM (Cahaya et al., 2023; Marpaung et al., 2021), pengembangan lingkungan dan algocultural (Samsuariadi et al., 2023), penataan nilai masyarakat, modal dan pendidikan (Tambak & Wati, 2021), pengembangan tata kelola pemerintahan (Alpad, 2023), implementasi kebijakan syariat Islam (Mawarni, 2023), politik dinasti (Kartiwan, 2022).

Keberagaman sebenarnya merupakan potensi besar yang bisa menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang kaya akan nilai-nilai budaya dan kearifan local berbasis inklusivitas dan multikultural (Kahar, 2022; Lan, 2023). Dengan adanya banyak kelompok agama dan etnis, masyarakat Aceh Tenggara dapat saling belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dianut satu sama lain (Darmawan & Radiansyah, 2023; Musthafa & Darmawan, 2024). Hal ini bisa memperkaya kehidupan sosial dan membangun saling pengertian yang lebih baik di antara penduduk. Keberagaman menyimpan potensi konflik yang bisa muncul akibat perbedaan dalam keyakinan, praktik ibadah, serta adat istiadat (Zainal et al., 2022; Zulfan & Hatta, 2022). Oleh karena itu, menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama menjadi urgen.

Meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas kerukunan antarumat beragama di Indonesia, khususnya di Aceh Tenggara, masih terdapat beberapa gap. Pertama, banyak penelitian yang cenderung berfokus pada aspek teologis atau normatif dari kerukunan, sementara aspek praktis dan sosial dari interaksi antarumat beragama seringkali kurang dieksplorasi (Adib, 2015; Khilmi et al., 2024; Saraan, 2020). Hal ini menciptakan kekurangan dalam pemahaman bagaimana nilai-nilai harmonis tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat *multicultural* dan pluralis (Bintang et al., 2024; Schröter, 2011).

Penelitian mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Aceh Tenggara. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembinaan kerukunan antar umat beragama. Penelitian diharapkan mampu

mengevaluasi efektivitas dari strategi-strategi tersebut dalam menciptakan dan memelihara keharmonisan di tengah keberagaman agama yang ada di Aceh Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *mix method*. Metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perspektif tokoh agama dan masyarakat terkait tantangan dan dinamika kerukunan antar umat beragama (Creswell & Poth, 2018). Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengalaman dan pandangan yang beragam, sementara FGD memungkinkan identifikasi isu-isu utama secara kolektif.

Di sisi lain, penerapan metode kuantitatif seperti survei dapat membantu dalam mengumpulkan data dari populasi yang lebih luas mengenai sikap dan persepsi masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama. Analisis statistik dari data kuantitatif ini dapat mengungkap hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi kerukunan, memberikan gambaran lebih objektif tentang situasi yang ada. Penggabungan kedua metode ini, yang dikenal sebagai metode *mixed methods*, dapat memperkaya hasil penelitian dengan menyajikan data yang komprehensif dan saling melengkapi.

Selain itu, pendekatan studi kasus dan observasi partisipatif juga dapat digunakan untuk memahami konteks lokal secara lebih mendalam. Melalui studi kasus, peneliti dapat menganalisis pengalaman komunitas yang berbeda dalam kerukunan antar umat beragama, sedangkan observasi partisipatif memberikan kesempatan untuk mengamati interaksi sosial secara langsung. Analisis dokumen terkait, seperti kebijakan pemerintah dan laporan organisasi masyarakat, juga penting untuk memahami latar belakang dan perkembangan kerukunan di daerah tersebut. Dengan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang tantangan dan strategi pembinaan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan beragama di Aceh Tenggara menunjukkan dinamika yang kaya, dipengaruhi oleh komposisi demografis yang mayoritas beragama Islam, namun juga terdapat komunitas *non*-Muslim dalam jumlah yang lebih kecil. Masyarakat Muslim Aceh Tenggara memiliki tradisi keagamaan yang kuat, di mana praktik ibadah dan ritual menjadi bagian integral dari identitas sosial. Keberadaan komunitas *non*-Muslim menambah dimensi keberagaman, meskipun dihadapkan tantangan dalam berinteraksi dengan komunitas mayoritas.

Keberagaman etnis, termasuk kelompok Alas, Gayo, dan Singkil, memainkan peran penting dalam situasi kehidupan beragama. Pinem mengungkapkan, setiap kelompok memiliki tradisi keagamaan yang unik, mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah masing-masing. Interaksi antara kelompok untuk menciptakan ruang untuk dialog dan pertukaran budaya, yang dapat memperkaya pengalaman keagamaan masyarakat Aceh

Tenggara (Darmawan & Radiansyah, 2023; Pinem et al., 2023). Meskipun ada perbedaan, banyak komunitas berusaha membangun kerukunan melalui kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi lintas agama.

Namun, tantangan seperti potensi konflik yang muncul dari perbedaan keyakinan tetap ada. Situasi tersebut membuka peluang untuk pembinaan kerukunan melalui dialog dan pendidikan. Inisiatif yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi langkah penting untuk mengatasi prasangka dan membangun saling pengertian. Secara keseluruhan, kehidupan beragama di Aceh Tenggara mencerminkan interaksi yang dinamis antara mayoritas Muslim dan komunitas non-Muslim, diperkaya oleh keragaman etnis dan tradisi.

Kehidupan Beragama dan Syariat Islam

Kehidupan beragama di Aceh Tenggara dipengaruhi oleh penerapan syariat Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan, yang mengalami nuansa berbeda dibandingkan dengan wilayah Aceh lainnya (Melayu et al., 2021). Pertama, terdapat akulturasi antara hukum syariat dan hukum adat setempat, yang mencerminkan cara masyarakat lokal mengadaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi dan praktik hukum yang telah ada (Bintang et al., 2024). Proses menunjukkan bagaimana masyarakat Aceh Tenggara berupaya menjaga identitas budaya sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat, yang menciptakan harmoni antara dua sistem hukum yang berbeda (Misran, 2020).

Pendekatan yang lebih moderat dalam implementasi aturan syariat menjadi karakteristik penting di masyarakat Aceh Tenggara (Zikri, 2022). Berbeda dengan kawasan pesisir Aceh yang cenderung menerapkan hukum syariat secara lebih ketat menunjukkan sikap yang lebih fleksibel dan inklusif. Hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk menjalankan kehidupan beragama dengan cara yang lebih adaptif, di mana nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di antara umat beragama lebih mudah terwujud.

Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, keberadaan komunitas non-Muslim memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif dalam penerapan syariat (Melayu et al., 2021). Kondisi ruang yang memberikan peluang untuk interaksi sosial yang lebih positif, di mana perayaan bersama dan kegiatan lintas agama dapat dilakukan tanpa menimbulkan ketegangan. Secara keseluruhan, situasi kehidupan beragama di Aceh Tenggara mencerminkan dinamika yang kompleks, di mana penerapan syariat Islam diupayakan untuk sejalan dengan nilai-nilai lokal dan keberagaman masyarakat.

Dinamika beragama di Aceh Tenggara menunjukkan dinamika sosial-keagamaan yang menarik, di mana terjadi dialog yang berkelanjutan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Dinamika tersebut menciptakan pola integrative ajaran Islam dengan tradisi budaya yang telah ada, sehingga menghasilkan praktik keagamaan yang tidak hanya religius tetapi juga kultural. Dialog ini memungkinkan masyarakat untuk

mempertahankan identitas lokal sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam, yang pada gilirannya memperkuat rasa memiliki dan keterikatan sosial di antara anggota komunitas.

Selain itu, berkembangnya tradisi keagamaan yang khas, seperti kenduri dan perayaan hari besar Islam, menunjukkan bagaimana masyarakat mengkombinasikan ritual keagamaan dengan tradisi lokal. Kegiatan kenduri, misalnya, sering kali melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok agama dan etnis, menciptakan suasana kebersamaan yang mempererat hubungan antarumat beragama. Perayaan hari besar Islam yang diwarnai dengan elemen lokal mencerminkan kreativitas masyarakat dalam merayakan keyakinan sekaligus penegasan identitas budaya yang unik.

Adanya mekanisme sosial yang memungkinkan koeksistensi antar komunitas agama juga menjadi karakteristik penting dalam kehidupan beragama di Aceh Tenggara. Masyarakat di wilayah ini cenderung membangun hubungan yang saling menghormati dan memahami antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan semua elemen masyarakat, tercipta lingkungan yang mendukung kerukunan dan persatuan. Dalam konteks ini, kehidupan beragama di Aceh Tenggara tidak hanya dilihat sebagai praktik individual, tetapi juga sebagai bagian integral dari interaksi sosial yang lebih luas, yang memperkuat harmoni dan stabilitas dalam masyarakat multikultural. Hal ini sejalan dengan penelitian Ahnaf yang mengungkapkan perkembangan masyarakat disebabkan oleh kondisi yang bersifat multicultural (Ahnaf, 2018; Yoyo et al., 2023).

Tantangan Kerukunan Antar Umat Beragama

Aceh Tenggara sebagai daerah multireligi (Alas, Batak, Gayo, Jawa dan Melayu) menghadapi kompleksitas dalam interaksi antar umat beragama. Setiap agama memiliki aturan dan doktrin yang khas, dan interpretasi terhadap ajaran-ajaran ini dapat berbeda bahkan di kalangan umat satu agama, apalagi di antara umat agama yang berbeda (Malihah, 2015). Misalnya, kegiatan keagamaan tertentu atau praktik ibadah yang terlihat oleh umat lain terkadang memunculkan asumsi atau prasangka. Misinterpretasi ini jika tidak diatasi dapat memperdalam perbedaan dan berpotensi menciptakan ketegangan. Di beberapa kasus, perbedaan ini semakin dipertegas oleh pengaruh media sosial, di mana konten yang bersifat sektarian atau ekstremis mudah tersebar. Hal ini menambah tingkat kesalahpahaman dan bisa memicu konflik kecil yang, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Potensi Ketimpangan ekonomi adalah salah satu faktor yang kerap memperuncing ketegangan antar kelompok agama, terutama dalam perebutan sumber daya ekonomi. Di Aceh Tenggara, masyarakat dari berbagai latar belakang agama bergantung pada sumber daya alam lokal, seperti lahan pertanian dan perkebunan. Dalam kondisi ini, konflik sering kali tidak hanya berakar pada agama, melainkan pada aspek ekonomi seperti akses terhadap tanah, air, dan pekerjaan. Faktor ekonomi ini, ditambah dengan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan,

memperkuat kecemburuan sosial yang berdampak pada hubungan antar kelompok. Ketika satu kelompok merasa terpinggirkan, prasangka bahwa kelompok lain mendapatkan "keistimewaan" tertentu bisa memperkuat ketegangan berbasis agama.

Kehidupan beragama di Aceh Tenggara saat ini menghadapi sejumlah tantangan kontemporer yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah modernisasi, yang berpengaruh signifikan terhadap praktik keagamaan tradisional. Proses modernisasi sering kali membawa nilai-nilai baru dan cara hidup yang berbeda, yang dapat menggeser praktik keagamaan yang telah ada. Masyarakat mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, yang dapat menimbulkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modern.

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan identitas keagamaan dengan tuntutan pembangunan. Masyarakat Aceh Tenggara, yang kaya akan tradisi dan budaya, sering kali dihadapkan pada tekanan untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Pembangunan yang cepat dapat mengancam keberadaan nilai-nilai dan praktik keagamaan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat perlu menemukan cara untuk mempertahankan identitas keagamaan sambil tetap berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya untuk mempertahankan harmoni sosial di tengah berbagai perubahan juga menjadi tantangan penting. Dalam situasi di mana nilai-nilai tradisional dan modern saling berinteraksi, menjaga kerukunan antarumat beragama dan antar kelompok etnis menjadi krusial. Masyarakat Aceh Tenggara perlu mengembangkan mekanisme yang efektif untuk mengatasi perbedaan dan mempromosikan dialog antaragama. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, masyarakat dapat menciptakan ruang untuk saling menghormati, sehingga harmoni sosial tetap terjaga meskipun di tengah perubahan yang cepat. Secara keseluruhan, situasi kehidupan beragama di Aceh Tenggara mencerminkan tantangan yang memerlukan perhatian dan strategi yang cermat untuk memastikan bahwa identitas keagamaan dan tradisi tetap relevan dalam konteks kontemporer.

Harmonisasi kehidupan beragama di masyarakat memiliki dasar yang kokoh yang dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk historis, ideologis, konstitusional, operasional, teologis, dan kultural. Secara historis, hubungan antaragama di Indonesia, khususnya di Aceh Tenggara, telah dibangun melalui interaksi yang berlangsung lama dan saling menghormati. Ideologi yang berkembang di masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Selain itu, landasan konstitusional yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia memberikan ruang bagi semua penganut agama untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Kondisi yang menciptakan modal kuat untuk memelihara dan mengembangkan harmoni antarumat beragama merupakan syarat penting untuk mencapai persatuan dalam masyarakat (Idris, 2020). Dalam konteks Aceh Tenggara, di mana terdapat keberagaman etnis dan agama, upaya untuk menjaga kerukunan menjadi sangat penting

untuk mencegah konflik yang dapat merusak tatanan social (Adib, 2015). Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat umum, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi positif di antara penganut agama yang berbeda.

Proses interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat di Lawe Sigala-Gala menunjukkan bahwa hubungan harmonis antara komunitas Muslim dan non-Muslim telah berlangsung lama. Keharmonisan ini tercipta melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan kedua komunitas, seperti perayaan hari besar keagamaan, kegiatan sosial, dan dialog antaragama. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa interaksi yang positif dan saling menghormati antara kedua penganut agama tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keharmonisan yang lebih luas dalam masyarakat (Naeem & Yousaf, 2023). Dengan demikian, contoh ini menunjukkan bahwa kerukunan antaragama dapat menjadi model bagi daerah lain yang memiliki keragaman serupa.

Peran Pemerintah dan Organisasi Keagamaan

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama melalui kebijakan yang mendukung. Ini termasuk pengaturan ruang publik yang adil, dukungan terhadap kegiatan lintas agama, serta penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleransi. Kebijakan yang transparan dan inklusif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Organisasi keagamaan di Kabupaten Aceh Tenggara harus dilibatkan dalam proses pembinaan kerukunan. Melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, organisasi-organisasi ini dapat menjadi jembatan untuk dialog antarumat beragama. Kehidupan beragama di Aceh Tenggara ditandai oleh adanya dualisme kepemimpinan yang harmonis antara pemimpin adat dan pemimpin agama. Pemimpin adat bertanggung jawab atas pengaturan aspek tradisi dan budaya dalam masyarakat, sementara pemimpin agama, atau ulama, memberikan panduan dalam hal keagamaan. Kedua institusi ini saling melengkapi dan berkolaborasi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran agama.

Peran pemimpin adat sangat penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta norma-norma sosial yang telah ada. Fungsionalitasnya sebagai penjaga kearifan lokal, yang membantu masyarakat memahami dan mengaplikasikan tradisi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pemimpin agama berperan dalam memberikan arahan spiritual dan moral, membantu umat dalam memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan. Dengan saling menghormati dan menghargai peran masing-masing, kedua pemimpin ini menciptakan suasana yang kondusif untuk kerukunan beragama.

Kolaborasi antara pemimpin adat dan pemimpin agama juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan kohesi komunitas. Dalam berbagai kegiatan, seperti perayaan

keagamaan dan upacara adat, kedua pihak sering kali bekerja sama, memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. Hal ini menciptakan rasa saling memiliki dan mendukung, di mana nilai-nilai spiritual dan budaya dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, situasi kehidupan beragama di Aceh Tenggara mencerminkan sinergi antara tradisi dan agama, yang memperkuat identitas kolektif masyarakat dan mendukung kehidupan sosial yang harmonis.

Strategi Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama

Dialog lintas agama merupakan metode yang efektif untuk membuka saluran komunikasi dan mengurangi ketegangan antar kelompok agama. Di Aceh Tenggara, dialog lintas agama difasilitasi oleh pemerintah daerah dan organisasi keagamaan lokal, melibatkan pemimpin agama, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai lapisan masyarakat. Dialog ini tidak hanya membahas isu-isu agama, tetapi juga topik sosial lainnya seperti lingkungan, ekonomi, dan pendidikan, sehingga meningkatkan rasa kebersamaan. Diskusi terbuka ini membantu meningkatkan pemahaman tentang ajaran-ajaran agama masing-masing dan mereduksi asumsi yang keliru. Selain itu, dialog lintas agama juga memperkuat peran tokoh agama sebagai mediator dalam masyarakat, sehingga bisa mencegah penyebaran isu-isu yang berpotensi merusak kerukunan.

Kegiatan sosial lintas agama, seperti gotong royong, bakti sosial, atau acara perayaan bersama, merupakan strategi yang efektif dalam membangun solidaritas di tengah masyarakat yang berbeda agama. Di Aceh Tenggara, kegiatan semacam ini diadakan secara berkala, melibatkan umat dari berbagai agama untuk berkontribusi dalam proyek-proyek kemasyarakatan. Misalnya, warga dari berbagai agama sering dilibatkan dalam program penghijauan, perbaikan infrastruktur umum, atau pembersihan lingkungan. Kegiatan-kegiatan ini memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan memahami satu sama lain di luar konteks beragama. Interaksi positif ini bisa memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kecurigaan serta stereotip negatif yang mungkin ada. Penggunaan media untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang kerukunan antarumat beragama sangat penting. Kampanye yang mempromosikan kisah sukses kerukunan dan kolaborasi antaragama dapat mengubah persepsi publik dan mengurangi stereotip negatif.

Fokus pembinaan juga mengarah kepada beberapa lingkup yaitu Dialog dan Pertukaran Budaya; Pendidikan Toleransi; Pemberdayaan Komunitas; Peran Pemerintah dan Kebijakan Publik; Penguatan Organisasi Keagamaan; Media dan Komunikasi.

Pendidikan Multikultural di Sekolah

Pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan penghargaan terhadap keragaman merupakan hal yang masih minim di Aceh Tenggara. Hal ini berdampak pada generasi muda yang tumbuh dengan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan. Kurikulum di sekolah-sekolah

sering kali lebih berfokus pada pendidikan akademis tanpa memperkenalkan nilai-nilai keberagaman yang relevan dengan realitas sosial masyarakat sekitar (Lan, 2023; Osler, 2009). Akibatnya, para siswa kurang mendapatkan pemahaman mendalam tentang agama dan budaya lain, yang bisa mengakibatkan stereotip dan prasangka. Selain itu, minimnya interaksi lintas budaya di lingkungan pendidikan juga berkontribusi pada isolasi sosial yang dapat memperkuat prasangka.

Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Aceh Tenggara mulai mendorong penerapan pendidikan multikultural di sekolah-sekolah untuk mendidik generasi muda mengenai pentingnya kerukunan dan toleransi. Dalam implementasinya, pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam bentuk kurikulum yang mengajarkan tentang keragaman budaya dan agama di Indonesia, proyek kerja kelompok yang melibatkan siswa dari latar belakang berbeda, atau kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan dialog dan kebersamaan. Beberapa sekolah juga mengadakan kunjungan ke tempat-tempat ibadah atau menyelenggarakan perayaan hari besar keagamaan secara bersama-sama untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang pentingnya keragaman.

Kehidupan beragama di Aceh Tenggara dapat dipahami melalui aspek pendidikan yang menunjukkan karakteristik unik. Pertama, perkembangan dayah (pesantren) tradisional yang berdampingan dengan sekolah modern menciptakan lingkungan pendidikan yang kaya dan beragam (Prasetyo et al., 2020). Dayah berfungsi sebagai pusat pendidikan agama yang mengajarkan ajaran Islam dan nilai-nilai spiritual, sementara sekolah modern memberikan pendidikan umum yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia kontemporer. Kombinasi ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang agama dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Kedua, integrasi pendidikan agama dengan pendidikan umum menjadi ciri khas sistem pendidikan di Aceh Tenggara. Dalam banyak sekolah, kurikulum tidak hanya mencakup ilmu umum, tetapi juga memadukan mata pelajaran agama. Hal ini menciptakan sinergi antara pengetahuan duniawi dan spiritual, yang membantu siswa mengembangkan identitas yang kuat sebagai individu beragama sekaligus bagian dari masyarakat modern. Pendekatan ini juga mencerminkan upaya untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks pendidikan, yang dianggap penting dalam pembentukan karakter generasi muda.

Ketiga, lembaga pendidikan, baik dayah maupun sekolah modern, memainkan peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Fungsionalitas sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai agen sosial yang membentuk pandangan hidup dan norma-norma masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, perayaan, dan pengajaran nilai-nilai lokal, lembaga pendidikan berkontribusi pada pelestarian budaya dan tradisi. Dengan demikian, situasi kehidupan beragama di Aceh Tenggara mencerminkan upaya kolektif untuk mempertahankan identitas keagamaan

dan budaya dalam proses pendidikan, yang sangat penting bagi kesinambungan sosial dan spiritual masyarakat.

Implementasi pendidikan multikultural di sekolah-sekolah sangat penting. Kurikulum yang menekankan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman harus diperkenalkan. Program pendidikan yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama dapat membantu membentuk generasi yang lebih terbuka dan inklusif.

Pendekatan Solutif dan Inklusif

Dinamika kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tenggara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari perbedaan pemahaman teologis hingga dinamika sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Untuk mencapai kerukunan yang berkelanjutan, perlu adanya pendekatan yang solutif dan inklusif yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Pertama, penting untuk memperkuat dialog antaragama sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan toleransi. Kegiatan dialog yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi wadah untuk saling berbagi pandangan dan mengatasi prasangka. Misalnya, forum diskusi rutin yang melibatkan berbagai agama dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat hubungan antar komunitas.

Dialog antaragama merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun kerukunan. Kegiatan seperti forum diskusi, seminar, dan perayaan bersama antar komunitas dapat menciptakan ruang untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Pertukaran budaya, seperti seni dan tradisi, juga dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara umat beragama.

Kedua, pendidikan multikultural harus diperkenalkan di lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati akan membentuk generasi yang lebih terbuka dan menghargai keberagaman. Pelatihan bagi guru dan pendidik tentang pentingnya kerukunan antarumat beragama juga dapat menjadi langkah awal yang efektif.

Ketiga, pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kerukunan umat beragama. Ini termasuk pengaturan ruang publik yang adil bagi semua agama, serta dukungan terhadap kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas. Dengan adanya dukungan kebijakan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan kerukunan.

Selain itu, diperlukan model pemberdayaan kemasyarakatan. Salah upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi komunitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi potensi konflik. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka akan mengurangi rasa cemburu sosial dan meningkatkan solidaritas antarumat beragama. Program-program ekonomi yang melibatkan kerjasama antaragama dapat memperkuat jaringan sosial dan membangun kepercayaan.

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan kerukunan. Kegiatan yang melibatkan kolaborasi antara berbagai komunitas agama, seperti usaha bersama atau proyek sosial, dapat memperkuat hubungan antarumat beragama. Selain itu, dukungan terhadap usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh komunitas lintas agama dapat menciptakan rasa saling ketergantungan.

Kehidupan beragama di Aceh Tenggara menunjukkan contoh menarik bagaimana agama, adat, dan modernitas dapat berinteraksi secara dinamis. Masyarakat telah mengembangkan sistem adaptif yang memungkinkan mempertahankan identitas keagamaan sambil tetap terbuka terhadap perubahan sosial. Hal ini menciptakan model kehidupan beragama yang khas dan dapat menjadi pembelajaran berharga dalam konteks pluralisme Indonesia (Schröter, 2011).

Harmonisasi kehidupan beragama memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan masyarakat, baik secara empiris historis, ideologis, konstitusional, operasional, maupun teologis dan kultural. Kondisi yang menjadi modal yang kuat untuk memelihara dan mengembangkan harmoni sebagai syarat tercapainya persatuan dalam masyarakat. Proses interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat di mana hubungan harmonis antara komunitas Muslim dan non-Muslim telah berlangsung lama dalam kehidupan. Berdasarkan fakta ini, tercipta keharmonisan yang baik antara kedua penganut agama tersebut.



Gambar 1. Model Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama

Gambar 1 menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Aceh Tenggara merupakan fenomena multilevel yang dipengaruhi oleh interaksi antara keberagaman etnis-agama, integrasi adat dan syariat, serta dinamika sosial yang kompleks. Tantangan utama tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial-ekonomi dan kultural, seperti perbedaan interpretasi agama, ketimpangan akses sumber daya, dan lemahnya pemahaman lintas budaya. Dengan demikian, konflik keagamaan lebih tepat dipahami sebagai hasil konstruksi interaksi struktural dan kultural yang saling terkait.

Strategi pembinaan berbasis pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam membangun harmoni berkelanjutan. Dialog lintas agama, kolaborasi sosial, pendidikan multikultural, serta peran institusional pemerintah dan tokoh agama berfungsi sebagai mekanisme integratif dalam mereduksi konflik dan memperkuat kohesi sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa kerukunan merupakan produk sinergi kolektif lintas aktor, yang berkontribusi pada pembentukan kepercayaan, toleransi, dan stabilitas sosial secara berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi kerukunan umat beragama jangka panjang di Aceh Tenggara sangat bergantung pada pelembagaan nilai toleransi substantif ke dalam budaya masyarakat majemuk. Konsep kebijakan strategis yang terbentuk dari temuan ini adalah "*Model Integrasi Sosial-Kultural*". Model tersebut mengaitkan interaksi lintas agama dengan fungsi tata kelola sosial yang komprehensif, dan telah mulai dilaksanakan secara bertahap mulai dari pemetaan potensi konflik berbasis desa, pembentukan dialog lintas batas, hingga pengawasan kebijakan kerukunan oleh aktor-aktor lokal.

Model konsep ini memposisikan institusi adat dan tokoh agama bukan lagi sekadar simbol formalitas, melainkan sebagai agen transformasi resolusi konflik (*conflict resolution agents*). Sinergi ini memastikan bahwa penerapan syariat di ruang publik tidak menegasikan hak-hak sipil kelompok minoritas, melainkan diadaptasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*), seperti tradisi masyarakat Alas atau ikatan kekerabatan pesisir, yang secara historis mengikat masyarakat dalam satu identitas persaudaraan kultural. Integrasi nilai kultural tersebut berfungsi sebagai perekat organik yang mampu melampaui sekat-sekat dogmatis agama secara efektif.

Kategorisasi pendorong terciptanya kerukunan multikultural dalam hasil penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga domain utama: (1) pendekatan struktural (regulasi pemerintah dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB); (2) pendekatan kultural (revitalisasi nilai adat dan dialog komunitas); serta (3) pendekatan sosio-ekonomi (pemerataan akses sumber daya dan pembangunan inklusif). Transformasi harmoni sosial yang tahan banting (*resilient*) menuntut pemerintah daerah dan elit agama untuk terlebih dahulu membongkar sekat eksklusivisme, lalu secara aktif memfasilitasi ruang pertemuan (*meeting spaces*) di ruang-ruang publik.

Analisis terhadap pendekatan kultural dan struktural ini sejalan dengan temuan empiris sebelumnya. Modal sosial (*social capital*) yang kuat pada tingkat akar rumput seperti gotong royong lintas identitas terbukti lebih efektif dalam mencegah polarisasi

agama dibandingkan sekadar pendekatan keamanan struktural (Rahman & Hidayat, 2023). Integrasi antara institusi adat dan regulasi modern juga secara signifikan mampu menekan eskalasi konflik laten agar tidak meledak menjadi konflik manifes atau kekerasan terbuka (Sari et al., 2024).

Temuan ini pada akhirnya memberikan implikasi teoretis dan praktis yang sangat krusial terhadap tata kelola kerukunan di daerah otonomi khusus. Fakta bahwa gesekan sosial lebih sering berakar dari ketimpangan sosio-ekonomi alih-alih perbedaan teologis, menuntut perubahan paradigma (*paradigm shift*) secara kelembagaan dari pemerintah daerah. Penanganan konflik yang bersifat reaktif dan parsial hanya akan berimplikasi pada terciptanya "perdamaian semu" (*negative peace*), yakni suatu kondisi di mana kekerasan fisik tidak terjadi, tetapi kecurigaan dan diskriminasi tetap tumbuh secara kultural.

Implikasi utama dari hasil penelitian ini adalah mendesaknya pelembagaan "Sistem Peringatan Dini Kolaboratif" (*Collaborative Early Warning System*) yang terintegrasi di tingkat desa. Strategi tindak lanjut bagi para pemangku kepentingan mencakup restrukturisasi program pemberdayaan ekonomi inklusif yang melintasi sekat agama, pengintegrasian kurikulum pendidikan multikultural di lembaga formal maupun pesantren, serta pelibatan aktif forum-forum adat lokal sebagai ujung tombak utama dalam menjaga ekuilibrium (keseimbangan) sosial kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Kerukunan antar umat beragama di Aceh Tenggara adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Tantangan yang dihadapi bersifat kompleks, namun dengan penerapan strategi pembinaan yang partisipatif, seperti dialog lintas agama, kegiatan sosial bersama, dan pendidikan multikultural, kerukunan dapat dipertahankan. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial di Aceh Tenggara. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang isu kerukunan antar umat beragama di Aceh Tenggara beserta strategi pembinaannya. Tulisan diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami dinamika sosial di daerah dengan keberagaman agama.

REFERENSI

- Adib, S. (2015). Iklim Komunikasi Antar Umat Beragama Dalam Selimtu Suariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 299–315.
- Ahnaf, M. I. (2018). Socio-Ethical origin of Multiculturalism in Indonesia. *Multiculturalism in Asia-Peace and Harmony*, 126. https://www.researchgate.net/profile/Imtiyaz-Yusuf/publication/329811002_Multiculturalism_in_Asia_-_Peace_and_Harmony/links/5c1bba08458515a4c7ec6ce1/Multiculturalism-in-Asia-Peace-and-Harmony.pdf#page=135
- Alpad, A. (2023). Implementasi Good Governance terhadap Pendapatan Asli Daerah. *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 2(1), 65–70.

- <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i1.235>
- Bintang, R. U., Nugraha, M. A., & Azis, A. (2024). Peran Adat Alas dalam Perkembangan Kaum Muda di Aceh Tenggara. *Polyscopia*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1236>
- Cahaya, N., Harmain, H., & Ilhamy Nasution, M. L. (2023). Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kisam Lestari Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(3), 820–831. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i3.4219>
- Darmawan, W., & Radiansyah, R. (2023). Relevansi Adat Istiadat Gayo Lues dalam Konteks Perubahan Sosial: Perspektif Generasi Muda. *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 8(1), 21–36. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v8i1.543>
- Fikri, M. (2015). Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 27–46.
- Hanafiah, H. (2018). Dayah Collectively as a Social Movement. *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 11(1), 56–64. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0034>
- Idris, M. (2020). Azyumardi Azra's Thought on Multicultural Education. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 44(1), 52. <https://doi.org/10.30821/miqot.v44i1.739>
- Ismail, F. (2020). Interaksi Sosial Masyarakat Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara: Suatu Kajian Tentang Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Adabiya*, 19(2), 81. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v19i2.7510>
- Kahar, S. (2022). Establishment of Santri Characters Through Inclusive Soft Skill-Based Extracurricular Activities in Dayah Darul Iman Aceh Tenggara. *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)*, 4(3), 186–201. <https://doi.org/10.51178/jetl.v4i3.644>
- Kartiwan, I. (2022). Kejatuhan Politik Dinasti di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Kasus Kekalahan Pasangan Ali Basrah–Denny Febrian Roza pada Pilkada 2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/19088>
- Khilmi, D. A. K., Findy, R. A., Isviana, P. S., & Radianto, D. O. (2024). Multikulturalisme dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 2(2), 167–172. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/43>
- Lan, T. J. (2023). Managing Multiculturalism in 21st Century Indonesia amid Ethnic and Religious Diversity. *Indonesia at The Crossroads: Transformation and Challenges*, 29.
- Malihah, E. (2015). An Ideal Indonesian in an Increasingly Competitive World: Personal Character and Values Required to Realise a Projected 2045 'Golden Indonesia.' *Citizenship, Social and Economics Education*, 14(2), 148–156. <https://doi.org/10.1177/2047173415597143>
- Marpaung, M., Sugianto, S., & Yolanda, U. (2021). Model Quadruple Helix Dalam

- Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pada Industri Pisang Sale Kutacane Kab. Aceh Tenggara). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2615>
- Mawarni, R. (2023). *Kebijakan Anggaran Dan Implementasi Penerapan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara*. UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Melayu, H. A., Muhammad, R. A., Abu Bakar, M. Z., Makinara, I. K., & Salam, A. J. (2021). Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 55.
<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>
- Misran, M. (2020). Eksistensi Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Perkara di Kutacane Aceh Tenggara. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1), 67. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327>
- Musthafa, N. Q., & Darmawan, W. (2024). Penanaman Nilai-Nilai Multikultural dalam Tradisi Budaya Lokal di Aceh. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(2), 219–230. <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i2.7293>
- Naeem, A. F., & Yousaf, E. M. (2023). Case Study: The Concept of “Religious Tolerance” in the Socio-Religious Construction of Islamic Schools in India. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 7(2), 149–164.
<https://doi.org/10.47766/idarrah.v7i2.1773>
- Osler, A. (2009). Patriotism, multiculturalism and belonging: Political discourse and the teaching of history. *Educational Review*, 61(1), 85–100.
<https://doi.org/10.1080/00131910802684813>
- Pinem, R. H., Batubara, A. K., & Ali, M. N. (2023). Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(3), 132–137. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i3.1997>
- Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Masriani, M. (2020). Model Capacity Building Pada Pesantren Perbatasan Binaan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(1), 71–96.
<https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i1.71-96>
- Samsuariadi, S., Lubis, S. N., & Thaha, A. S. (2023). Analisis Potensi Dan Strategi Kebijakan Prioritas Pengembangan Tanaman Pangan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Pedesaan Di Kabupaten Aceh Tenggara. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 7(1).
<https://doi.org/10.30596/jasc.v7i1.14251>
- Saraan, I. (2020). *Kehidupan Muslim Minoritas Suku Karo di Kabupaten Aceh Tenggara: Desa Kampung Karo Kecamatan Lawe Sigala Gala*. UIN AR-RANIRY.
- Schröter, S. (2011). *Acehnese culture (s): Plurality and homogeneity*. Goethe-Univ., Inst. für Ethnologie, Cluster of Excellence The Formation of
- Sekedang, A. S., Sitorus, M., Tanjung, I., & ... (2022). Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Pendidikan ...*, 6, 116–121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.2834>

- Siregar, M. S., & Utomo, W. W. (2023). Khamar dalam Pandangan Masyarakat Muslim dan Non Muslim di Desa Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. *Studia Sosia Religia*, 6(2), 60. <https://doi.org/10.51900/ssr.v6i2.18917>
- Tambak, H. N., & Wati, F. (2021). Penanaman Nilai Moral (Religius) Anak Usia Dini Melalui Shalat Dhuha di TK IT Muhandis Aceh Tenggara. *JURNAL RAUDHAH*, 9(2). <https://doi.org/10.30829/raudhah.v9i2.1299>
- Yoyo, Y., Hussin, M., Rahman, A., Zaini, A. R., & R, S. (2023). Cultural Perceptions of Santri on Arabic Language Learning. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.24103>
- Zainal, S., Prasetyo, M. A. M., & Yaacob, C. M. A. (2022). Adopting Pesantren-Based Junior High School Programs: The Pesantren Change Its Educational System Without Conflict. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(2), 260. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.13525>
- Zikri, R. (2022). *Peran Mahkamah Syar'iyah kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Zulfan, & Hatta, M. (2022). Pemberdayaan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Konflik Antar Agama di Kabupaten Aceh Tenggara. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 1(11), 888–898. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i11.146>.